

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Solikah (2007) penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan dan opini tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*. Sebanyak 147 perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2005 dan 2006 yang telah digunakan sebagai bahan penelitian. Hasil yang ditunjukkan oleh peneliti adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi keuangan terhadap *opini audit going concern*.

Penelitian yang kedua oleh Setyarno dan Januarti (2006) penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit *going concern*. Penelitian ini menggunakan 4 Variabel, yaitu 2 variabel keuangan (kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan penjualan) dan 2 variabel non keuangan (kualitas audit dan opini audit tahun sebelumnya). Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000-2004 yang telah digunakan sebagai bahan penelitian. Metode yang dipilih ialah metode *purposive sampling* dan yang terpilih ialah 295 perusahaan. Penelitian ini telah memberikan bukti bahwa variabel kondisi keuangan dan opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sedangkan variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian ketiga oleh Petronila (2007) menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap opini audit *going concern*. Penelitian ini menggunakan variabel perusahaan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, kepemilikan anggota dewan, kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan resiko saham. Dari penelitian ini didapat bukti bahwa ada empat variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern* yaitu perubahan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, kepemilikan anggota dewan, serta resiko saham. Sedangkan variabel kualitas KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Tri Subakti dan Ghozali (2009) penelitian ini menganalisa pengaruh kualitas audit, kondisi perusahaan (profitabilitas, leverage, kapitalisasi pasar), dan manajemen laba terhadap opini audit *going concern*. Sebanyak 145 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2005-2007 yang digunakan sebagai sampel. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kualitas audit, profitabilitas, leverage, manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, Sedangkan kapitalisasi pasar memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian kelima oleh Kadek and Melistiari (2021) penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kondisi keuangan, kualitas audit, manajemen laba dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2007-2009. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kondisi keuangan, kualitas audit, manajemen laba dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*. Penelitian ini menggunakan 131 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh 63 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kondisi keuangan, kualitas audit dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*. Sedangkan opini *going concern* tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini *going concern*.

Penelitian keenam oleh Santosa dan Wedari (2007) menyimpulkan bahwa pada penerimaan opini audit dapat ditunjukkan melalui observasi kondisi internal perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Hasilnya, kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi opini *going concern*, sedangkan ukuran perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini *going concern*.

Penelitian ketujuh oleh Indira Januarti (2009) Penelitian ini menggunakan faktor perusahaan, kualitas auditor serta kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Faktor perusahaan terdiri dari *financial distress*, *debt*

default, ukuran perusahaan, audit lag opini sebelumnya, audit *client tenure* dan *opinion shopping*. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit, debt default, opini sebelumnya, ukuran perusahaan, dan pergantian auditor (audit *client tenure*) *opinion shopping* berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*, tetapi *financial distress*, audit lag, *opinion shopping*, kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*.

2.2 Landasan Teori

Beberapa teori yang dijadikan dasar dan pendukung peneliti dalam penelitian ini antara lain:

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent.

Baik maupun agent diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agent. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Tujuan utama dari teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan yang berbeda. Teori keagenan (*agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan principal dan agent saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi apakah agent telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua, masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap risik. Inti dari hubungan keagenan adalah di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan antara

kepemilikan (pihak *principal*) yaitu pemegang saham dengan pihak pengendalian (pihak *agent*) yaitu manajer yang mengelola perusahaan.

2.2.2 Opini Audit

Opini Audit merupakan informasi utama dari laporan audit tersebut. Auditor sebagai pihak yang independen dalam memberikan penilaian laporan keuangan diberi tugas untuk memberikan opini atas laporan keuangan itu sendiri. Opini yang diberikan adalah pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material, tentang posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (SPAP, 2004: 410.2). Opini audit tersebut dinyatakan sebagai pendapat dalam laporan audit. Menurut Mulyadi (2002) dalam Kartika et al. (2012:27) terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan auditor yaitu:

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan dibuat secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Pendapat ini akan diberikan jika standart auditing dapat menjadi pedoman pelaksanaan oleh audit. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, dan hanya pada saat tertentu bahasa penjelasan diperlukan. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat auditor yang didasarkan oleh laporan auditor independen lain,

- b. Ditemukan penyimpangan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI
- c. Ketidakpastian yang material telah mempengaruhi hasil laporan keuangan
- d. Keraguan auditor terhadap perusahaan
- e. Adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi yang telah ditemukan auditor

3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Apabila laporan keuangan disajikan secara wajar oleh auditee maka opini yang diberikan ialah pendapat wajar dengan pengecualian, disertai semua materia yang telah sesuai dengan prinsip akuntansi secara umum di Indonesia.. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan kepada perusahaan yang berada dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Auditor mengalami kendala karena keterbatasan ruang lingkup audit, sehingga auditor tidak memiliki bukti yang kompeten.
- b. Auditor memiliki keyakinan yang kuat bahwa dalam laporan keuangan terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi.

4. Pendapat tidak Wajar (*adverse opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar laporan posisi keuangan, hasil dari usaha,serta arus kas tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor mampu memberikan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak yang utama sehingga menyebabkan pendapat tidak wajar diberikan pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

5) Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika dia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Pernyataan diberikan apabila:

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

Opini auditor dihasilkan dari beberapa tahap audit yang telah dilakukan sebelumnya yang akhirnya opini audit tersebut menjadi kesimpulan dari proses audit dari laporan keuangan sebuah perusahaan.

2.2.3 Opini Audit Going Concern

Opini audit *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Dengan adanya *Going Concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang. Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah :

1. Kerugian usaha yang besar dalam kurun waktu yang relatif lama dan terus-menerus.
2. Mengalami kekurangan modal kerja pada tahun berjalan dan terjadi berulang.
3. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang yang sudah jatuh tempo.
4. Hilangnya pelanggan utama yang menyebabkan terjadinya penurunan omzet penjualan secara signifikan.
5. Terdapatnya gugatan dan perkara hukum yang mengancam perusahaan berhenti aktivitas usahanya.
6. Terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi, dsb. yang mengakibatkan berhentinya aktivitas usaha dari perusahaan tersebut.

Pemberian status *going concern* bukanlah tugas yang mudah. Dalam pemberian opini *going concern* auditor sering kali mengalami kesulitan dalam memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga banyak auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberi opini audit *going concern*.

Opini audit *going concern* dapat diberikan jika auditor mengalami keraguan yang besar pada sebuah perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa analisis.

2.2.3.1 Tanggung Jawab Auditor

Auditor memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah ada kesangsian besar terhadap kemampuan 23 entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tersebut, kurang dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang telah diaudit dengan cara berikut ini (IAI, 2001) :

1. Auditor memberi pertimbangan apakah semua hasil prosedur yang dilakukan menunjukkan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tersebut. Diperlukan informasi tambahan tentang kondisi dan peristiwa beserta bukti yang dapat mendukung informasi yang mampu mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, yang harus dilakukan ialah :
 - a. Mendapat informasi tentang rencana manajemen dalam mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut,
 - b. Mengevaluasi rencana tersebut dapat efektif dilaksanakan.
3. Setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor menarik kesimpulan apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. SA Seksi 341 paragraf 04 memberikan pernyataan bahwa memprediksikan kondisi atau peristiwa yang akan datang ialah bukan menjadi tanggung jawab auditor. Jika auditor tidak memperlihatkan keraguan besar dalam jangka waktu kurang dari satu tahun setelah tanggal laporan keuangan maka kemungkinan entitas akan menerima laporan yang menyatakan bahwa kelangsungan hidupnya akan berakhir.
4. Oleh karena itu, tidak mencantumkan keraguan yang besar dalam hasil laporan audit seharusnya tidak dipandang menjadi jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 2001)

2.2.3.2 Pertimbangan atas Kondisi dan Peristiwa

SA Seksi 341 paragraf 06 memberikan pernyataan bahwa auditor dapat mengidentifikasi informasi tentang kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar pada kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (kurang dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Contoh kondisi dan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ini (IAI, 2001) :

1. Kerugian operasi yang sering terjadi seperti negatifnya arus kas kegiatan usaha, perusahaan kurang memiliki modal kerja, kurang baik rasio keuangan yang dialami perusahaan merupakan contoh dari tren negatif
2. Petunjuk lain mengenai kemungkinan *financial distress* salah satunya, terlambat membayar dividen, tidak mampu memenuhi kewajiban hutang serta perjanjian, ditolaknya pengajuan permintaan pembelian kredit biasa oleh pemasok, mencari sumber pendanaan baru, atau menjual sebagian aktiva.
3. Masalah intern contohnya ialah mogok kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan yang besar atau suksesnya proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang terjadi, sebagai contoh gugatan pengadilan yang diadakan, timbulnya masalah baru yang dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, hilangnya franchise, pentingnya lisensi atau paten, hilangnya pemasok, menanggung rugi dari adanya bencana alam seperti kekeringan, banjir, gempa bumi yang tidak diasuransikan.

Arens dan Lobbecke (1996:52) memberikan pernyataan bahwa ada beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian tentang kelangsungan hidup perusahaan, sebagai berikut :

1. Kerugian usaha yang terjadi secara berulang dalam jumlah yang besar
2. Perusahaan tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dalam jangka yang pendek
3. Hilangnya pemasok utama
4. Perkara yang dipengadilan, gugatan hukum dan masalah yang terjadi secara berulang yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

2.2.3.3 Pertimbangan Dampak informasi Kelangsungan Hidup Entitas Terhadap Laporan Auditor

SA Seksi 341 paragraf 10-14 tentang dampak informasi kelangsungan hidup entitas terhadap laporan auditor sebagai berikut ini (IAI, 2001).

1. Setelah mempertimbangkan dampak dari kondisi dan peristiwa yang telah terjadi, kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Apabila telah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa yang terjadi, auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas maka auditor wajib menilai rencana manajemen. Auditor memberi kesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat mengurangi dampak negatif dari kondisi sehingga auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
3. Apabila auditor memberikan kesimpulan bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan mengenai kelangsungan hidup satuan usaha, serta rencana manajemen. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2.2.4 Kondisi Keuangan

Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Informasi mengenai operasional perusahaan juga dapat dilihat pada posisi keuangan perusahaan dan melaporkan situasi keuangan. Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak baik biasanya banyak ditemukan masalah-masalah yang terkait dengan *going concern*. Auditor tidak pernah memberi opini audit *going concern* pada perusahaan yang tidak memiliki masalah kesulitan keuangan. Sebaliknya, perusahaan mendapat opini audit *going concern* jika kondisi keuangan perusahaan tersebut semakin buruk.

Mutchler (1985) dalam Santosa Wedari (2007:11) mengungkapkan berbagai karakteristik bisnis yang buruk diantaranya, bisnis memiliki modal total, arus kas negatif, pendapatan operasional negatif, modal kerja negatif, rugi tahunan, dan defisit laba ditahan tahunan. Model prediksi Zscore Altman yang digunakan. Ditemukan oleh Ramadhany(2004:146-160) model prediksi kebangkrutan berpengaruh pada pemberian opini audit. Penelitian yang dilakukan Setyarno and Januarti (2006:24) juga memberi bukti bahwa model prediksi kebangkrutan Altman memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sampai saat ini, model Z score telah digunakan oleh banya peneliti akuntansi, ahli dan para akademis daripada model prediksi kebangkrutan lainnya Altman (1993) dalam Fanny dan Saputra (2005:78).

Z score yang digunakan untuk menganalisa kecenderungan kebangkrutan dan sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Z score dapat diandalkan sebagai alat analisis terlepas dari ukurannya. Meskipun bila sebuah perusahaan sangat jaya, namun jika Z score mulai turun dengan tajam, maka diindikasikan adanya bahaya kebangkrutan. Atau, bila perusahaan baru saja memulai, Z score bisa digunakan sebagai alat bantu dalam melihat dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan. Definisi kelima rasio yang dikembangkan Altman:

1) $Z_1 = \text{Net Working Capital to Total Assets}$

Net Working Capital to Total Assets (NWCTA) adalah suatu rasio ini menunjukkan bersihnya modal kerja secara keseluruhan total aktiva yang dihasilkan karena kemampuan perusahaan. Modal kerja bersih dibagi dengan total aktiva menjadi cara bagaimana rasio dapat dihitung. Aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar adalah cara untuk memperoleh modal kerja bersih. Aktiva lancar yang kurang tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendek tersebut sehingga modal kerja bersih yang dihasilkan ialah negatif karena adanya masalah yang dialami perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya.

2) $Z_2 = \text{Retained Earnings to Total Assets}$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva, bukan aktiva per ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terjadi karena pemegang saham biasa mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali laba yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam neraca bukan merupakan kas dan “tidak tersedia” untuk pembayaran dividen atau yang lain.

3) $Z_3 = \text{Earning Before Interest and Tax to Total Assets}$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum pembayaran bunga dan pajak.

4) $Z_4 = \text{Market Value of Equity to Book Value of Debt}$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar ekuitas sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang.

5) $Z_5 = \text{Sales to Total Assets}$

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktivanya. Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan laba.

Tabel 2.1
Kriteria titik cut off Model Z Score

Kriteria	Nilai Z
Tidak bangkrut/ sehat jika Z lebih dari (>)	2,99
Daerah rawan bangkrut (<i>grey area</i>)	1,80 – 2,99
Bangkrut jika Z kurang dari (<)	1,80

Sumber: Muslich 2008 dalam (Mastuti et al. 2012:3-4)

2.2.5 Manajemen Laba

Cara yang digunakan manager dalam mempengaruhi angka laba dengan melakukan secara sengaja dengan cara memilih kebijakan dan prosedur akuntansi yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen laba suatu tindakan menaikkan serta menurunkan laba periode berjalan dari unit usaha yang dilakukan oleh seorang manajer, tanpa menimbulkan kenaikan dan penurunan profitabilitas ekonomi unit tersebut. Dua motivasi utama para manajer melakukan manajemen laba, yaitu tujuan oportunistik dan informasi (*signaling*) kepada investor. Tujuan oportunistik mungkin dapat merugikan pemakai laporan keuangan karena informasi yang disampaikan manajemen menjadi tidak akurat dan juga tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistik ini dinilai sebagai sikap curang manajemen perusahaan yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi *intertemporal choice* (Kondisi yang memaksa eksekutif tersebut menggunakan keputusan tertentu dalam melaporkan kinerja yang menguntungkan bagi dirinya sendiri ketika menghadapi situasi tertentu). Sikap curang tersebut didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja dan didesain untuk menipu orang lain sehingga menyebabkan hilangnya kekayaan (Beneish 2001). Tujuan informatif (*signaling*) kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek perusahaan masa datang. Oleh karena itu, manajer dapat mengestimasi secara baik laba masa datang dan diinformasikan kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainnya. Manajer dapat menggunakan diskresi akrual untuk merefleksikan kinerja perusahaan tersebut melalui laporan laba (Gul et al, 2003)

Manajemen laba menjadi salah satu kegagalan dunia untuk menciptakan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Laporan keuangan yang seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder menjadi kehilangan makna. Menurut Ayres (1994:27-29) terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan manajemen laba, yaitu :

- 1) Kebijakan Akuntansi
Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan akuntansi lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut
- 2) Pendapatan
Dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan.
- 3) Biaya
Menganggap sebagai beban/biaya atau sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya.

Kusuma (2006) menyatakan bahwa tujuan oportunis dan informasi (*signaling*) adalah motivasi utama para manajer saat melakukan manajemen laba. Tujuan oportunis mampu merugikan pemakai laporan keuangan karena informasi yang diberikan tidak akurat dan juga tidak dapat menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap curang yang dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan pada saat menghadapi kondisi yang mengharuskan eksekutif tersebut mengambil tindakan tertentu pada saat melaporkan kinerja perusahaan untuk kepentingan pribadi pada saat menghadapi situasi tertentu. Tujuan informasi atau signaling memberi dampak positif terhadap para pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Informasi relevan merupakan informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Sedangkan informasi yang andal merupakan informasi yang tidak menyesatkan, dengan menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur serta informasi yang disajikan telah terverifikasi.

Keputusan yang telah dilakukan oleh investor menyebabkan laba yang disajikan tidak menyesatkan penggunaannya. Angka-angka pada pelaporan keuangan mempengaruhi kualitas laba merupakan salah satu tindakan manajemen (Tri Subakti dan Ghozali 2009). Manipulasi laba yang dilakukan manajemen bertujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadinya. Tindakan manajemen laba dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT) dan *Agency Theory*. Tiga

hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh watts and Zimmerman (1996) dalam Tri Subakti dan Ghozali (2009) adalah :

1) *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey* tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada diatas *cap*, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada diatas *cap*. Jadi hanya jika laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

2) *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3) *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

2.2.6 Mekanisme Corporate Governance

Corporate Governance ialah proses tata kelola perusahaan dijalankan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antar manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. *Corporate governance* juga memberikan struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Wisnumurti dan Yuyetta 2010). *Corporate Governance* adalah beberapa peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus dan pengelola perusahaan, pihak dari kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau sistem yang mampu mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yang dikutip oleh FCGI dalam terbitannya, ada lima unsur penting dalam *Corporate Governance* antara lain :

a. Transparan (*Transparency*)

Prinsip transparansi berharap instansi memberikan informasi dan wawasan yang dapat dilihat dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Demikian pula yang menjelaskan bahwa transparansi adalah pemberian informasi yang akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Dalam bentuk cara dan memberikan informasi, subjek penelitian telah memberikan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen dengan mengakses website, memberikan informasi kepada konsumen, organisasi lain akan dipublikasikan melalui papan buletin, surat dan selama pertemuan.

Pemberian informasi sesuai batasan dan tanggung jawab merupakan metode yang digunakan oleh subjek penelitian, karena dapat dilihat sebagai penyimpangan dari metode pembawaan atasan ke bawahan yang terdiri dari tingkatan, merupakan cara dalam internal. Kemudian ada prinsip pemahaman bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui refleksi melalui pertemuan tetapi melalui kebijakan para pemimpin, sebagaimana ditunjukkan oleh KNKG (2006) bahwa Industri tidak hanya mulai terlihat. masalah yang berkaitan dengan hukum dan peraturan, tetapi juga penting untuk mengambil keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui prinsip transparansi

terlihat kurangnya penyampaian visi dan misi perusahaan secara langsung kepada karyawan yang dilakukan secara tertulis pada spanduk, banner dan juga ID Card yang dimiliki masing-masing karyawan adalah bukti bahwa subjek penelitian masih belum maksimal dalam menerapkan GCG. Visi dan misi perusahaan sangat penting agar proses bisnis dapat lebih terarah.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Konsep akuntabilitas dapat dilihat dari struktur organisasi, jumlah tugas, kesesuaian tugas dengan kemampuan pegawai, kinerja pegawai, pencapaian tujuan, penetapan, dalam proses peninjauan dan evaluasi internal topik penelitian, forum RUPS (Rapat Umum Pemangku Kepentingan) dan kode etik. Menurut KNKG (2006) perusahaan harus mampu mempresentasikan kinerjanya secara jelas dan akurat. Untuk itu bisnis perlu dikelola secara efektif, terukur dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan kebutuhan stakeholders dan stakeholders lainnya.

Subyek penelitian memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan ditulis sesuai dengan kurikulum, yang jelas mendefinisikan fungsi dan tanggung jawab masing-masing divisi dan tidak ada kegiatan duplikat di divisi. Struktur organisasi saat ini, subjek penelitian tidak mengadakan rapat RUPS dan hanya mengadakan tinjauan manajemen. RUPS sebagai badan hukum merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting tentang modal yang ditanamkan dalam usaha, dengan memperhatikan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG 2006). Selain itu, struktur organisasi subyek penelitian tidak sesuai dengan undang-undang di PT No. 40 tahun 2007.

Dalam hal akuntabilitas yang menuntut perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, subjek penelitian melakukan penilaian kinerja dari awal masuk, kemudian job training dan juga penilaian dari pengawas atau atasan ketika bekerja. Demikian pula dalam penggunaan *reward and punishment*, yang dimaksudkan untuk membayar karyawan yang telah mencapai suatu tujuan tetapi juga memberikan hukuman jika karyawan tersebut gagal mencapai tujuan setelah diberikan.

Subjek penelitian memiliki badan pengatur internal yang memelihara otoritas internal yang sesuai untuk mencapai tujuan, dimana proses evaluasi dilakukan dalam bentuk badan administratif dan pemilik yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil penelitian. Hal ini didukung oleh Sutedi (2011) yang menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan industri dalam hal praktik bisnis yang perlu dilaporkan dan dirasakan oleh pemangku kepentingan, yaitu sifat tanggung jawab industri, bisnis kepada pemiliknya.

Dalam menerapkan etika tanggung jawab, subjek penelitian memiliki kode etik yang mengatur prosedur atau kesepakatan profesi dengan pemangku kepentingannya dan juga mengatur cara karyawan berinteraksi dengan rekan kerja. Kode etik selalu diterapkan pada topik penelitian kepada karyawan. Kode etik penting dalam suatu industri karena dalam industri apa pun, kode etik yang ditetapkan oleh unit bisnis menambah nilai bisnis (Sawyer, et al., 2005). Secara keseluruhan menunjukkan bahwa subjek penelitian telah menerapkan GCG sebagai prinsip yang bertanggung jawab, hanya peneliti diharuskan menyesuaikan struktur organisasi organisasi sesuai undang-undang di PT No. 40 Tahun 2007 dengan harapan forum RUPS dapat dilaksanakan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Asal usul tanggung jawab dapat dilihat dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat, tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab kepada pelanggan dan kepatuhan organisasi terhadap hukum. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerja, subjek penelitian memberikan sertifikat keselamatan kerja dan memberikan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, subjek penelitian membayar iuran yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) kota atau kabupaten dan membayar cuti sesuai aturan yang ada. Memberikan sertifikasi keselamatan kerja dan memberikan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS sebagai tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya.

Subjek penelitian juga menunjukkan tanggung jawab konsumen untuk memenuhi tujuan tanggung jawab yang dibuktikan dari pemenuhan kebutuhan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas, layanan yang lengkap

dan ramah serta program CSR. Selain itu, dalam menjalankan perannya sebagai subjek penelitian, mereka memenuhi tanggung jawab kepada Negara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemotongan pajak dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan (Zarkasyi, 2008) yang berpendapat bahwa pelaku usaha perlu mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan guna menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independen (*Independency*)

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang dilakukan, diketahui bahwa tidak ada organisasi yang bertanggung jawab terhadap organisasi lain, juga tidak ada organisasi yang terlibat dalam pekerjaan yang sama karena telah memiliki tugas masing-masing. Apalagi dalam menerapkan prinsip independensi, subjek penelitian tidak melihat adanya konflik kepentingan antara stakeholder dan shareholder. Pernyataan (Zarkasyi, 2008) dalam menerapkan prinsip kemandirian, organisasi harus beroperasi secara mandiri sehingga setiap wilayah organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinterupsi oleh pihak lain. Setiap organisasi harus menghindari dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun, tanpa konflik kehendak dan pendapat atau tuntutan, keputusan dibuat dengan benar.

Tidak ada keluarga yang tidak terlibat dalam memiliki saham tetapi terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah hanya menetapkan aturan dan tidak ada yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Subyek penelitian telah menerapkan GCG sebagai sumber kemandirian, sebagaimana dijelaskan KNKG (2006) bahwa untuk mempercepat penerapan prinsip-prinsip GCG, industri perlu beroperasi secara independen agar tidak kewalahan, setiap bagian bisnis saling melindungi dan tidak dapat dihubungkan oleh pihak lain.

e. Kewajaran atau kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran (*fair or equal*) dapat dilihat dalam bentuk pemerataan bagi semua pemangku kepentingan dan waktu usaha yang sama. Menurut KNKG

(2006) dalam menjalankan fungsinya, perusahaan perlu senantiasa memantau kepentingan stakeholders dan stakeholders lainnya dalam kaitannya dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa subjek penelitian bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam memastikan semua hak-hak mereka, sesuai dengan KNKG (2006) yang menyatakan bahwa Bisnis memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada pemangku kepentingan sesuai manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Dalam hal ini, subjek penelitian memberikan kesempatan kepada masing-masing pemangku kepentingan untuk memberikan ide dan gagasan untuk kepentingan profesi dalam rangka memimpin profesi ke arah yang lebih baik, misalnya KNKG (2006) berpendapat bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan mengemukakan gagasan untuk kepentingan organisasi.

Hal ini didukung oleh Zarkasy (2008) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, lembaga harus selalu mendengarkan kebutuhan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Selain itu, dalam memenuhi tujuan persyaratan, subjek penelitian menerapkan proses sesuai aturan melalui test dan wawancara serta harus menerapkan kriteria tertentu. Selain itu, terdapat jenjang karir untuk karyawan yang lebih efisien dengan memberikan kesempatan yang sama untuk promosi jabatan.

Pentingnya komponen GCG dikarenakan penerapan GCG dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kaihatu 2006). Diterapkannya GCG diharapkan mampu mengurangi tindakan manipulasi data keuangan yang dilakukan manajer. (Jensen, 1993 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). Penerapan *GCG* dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu membuat perusahaan terhindar dari kebangkrutan serta kecilnya kemungkinan mendapat opini audit *going concern*.

Syakhora (2005) dalam Petronila (2007) membedakan *corporate governance mechanism* menjadi dua kelompok yaitu *internal corporate governance mechanism* dan *external corporate governance mechanism*.

- 1) Mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat internal merupakan interaksi antara pihak-pihak pengambil keputusan dalam perusahaan yang mencakup Dewan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*), *Executive Management* yang di dalamnya termasuk Komite Audit (*Audit Committee*), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat eksternal merupakan interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi kinerja perusahaan, antara lain Stakeholders (karyawan, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat) dan *reputational agents* (akuntan, pengacara, badan pemeringkat kredit, manajer investasi). S. Beiner et al, (2003) dalam Wulandari (2006:35) mengemukakan bahwa indikator mekanisme *internal corporate governance* terdiri dari jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen, dan *debt to equity*. Sedangkan indikator mekanisme *eksternal corporate governance* terdiri dari *institutional ownership*.

2.2.7 Kepemilikan Manajerial

Gideon (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham dengan mengendalikan jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong kinerja bisnis yang lebih baik dan memperkuat kekuatan yang ada, karena mereka juga menanggung konsekuensinya.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Kepemilikan manajerial dapat meminimalisir masalah keagenan antara manajemen, karena kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial yang berlebihan dalam

suatu perusahaan dapat mengurangi kemungkinan manajer untuk mengubah pendapatan sesuai kepentingan mereka.

Kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang baik dengan perekonomian. Hasil penelitian ini mendukung bahwa Kepemilikan manajerial mengurangi perilaku oportunistik manajer yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Fungsi kepemilikan manajerial adalah untuk mengawasi perilaku manajemen dengan manajemen laba yang dapat merugikan perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang sebenarnya dan wajar.

2.2.8 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner et. al., 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007)). Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kepemilikan individu. Adanya kepemilikan investor institusional menyebabkan peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan tingginya hak voting yang dimiliki manajer. Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer maka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Meningkatnya efisien pemakaian aktiva perusahaan menandakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan. Dengan demikian diharapkan

akan ada monitoring atas keputusna manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan perusahaan.

2.2.9 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris merupakan salah satu pelaku utama administrasi bisnis yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan rencana bisnis sesuai dengan tujuannya, mengawasi pengelolaan administrasi bisnis dan memerlukan tanggung jawab dalam hal mencegah timbulnya krisis. Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah: pemantauan penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, pemantauan dan pengambilan keputusan, perselisihan kepentingan di tingkat manajemen, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, penyalahgunaan aset usaha dan penyelewengan dalam operasional usaha. Namun dalam praktiknya dewan komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga diperlukan dewan komisaris yang benar-benar independen.

Persentase komisaris independen dihitung berdasarkan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta tidak mempunyai hubungan usaha atau hubungan afiliasi lainnya dengan manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Keberadaan Dewan Komisaris dalam bentuk pengawasan sangat penting dalam rangka memperkuat fungsi operasional Dewan Komisaris. Kehadiran Komisi Independen menjadi penting, karena dalam praktiknya, lembaga seringkali berada dalam konflik keinginan untuk mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (small shareholder) dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya standar yang lebih tinggi dan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan profesi dan kepentingan rakyat. Hak sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris .

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama

dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan controlling shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) perusahaan Tercatat yang bersangkutan
2. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Diharapkan komisaris independen dapat memberikan keadilan sebagai alasan utama untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang kurang terlayani seperti minoritas dan kepentingan lainnya (Linoputri ,2010). Kehadiran komisi independen dapat menyeimbangkan proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan perlindungan minoritas dan pemegang saham, yang dimaksudkan untuk mengubah tinjauan menjadi memberikan pendapat yang mengarahkan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Kondisi Keuangan Perusahaan dan Opini Going Concern

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Opini audit *going concern* tidak akan diberikan oleh auditor jika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik (Ramadhany,2004). Pada perusahaan yang sakit, banyak ditemukan indikator masalah *going concern*. Auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Auditor cenderung mengeluarkan opini audit *going concern* ketika kemungkinan kebangkrutan ada diatas 28% diperkuat oleh penemuan Krishnan

dan Krishnan 1996 dengan menggunakan model probit Zmijewski 1984. Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno dan Januarti (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini *going concern*.

Salah satu komponen keputusan adanya *going concern* ialah prediksi kebangkrutan. Altman menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam beberapa periode sebelum kebangkrutan benar-benar terjadi. Altman dan McGough (1974) dalam Fanny and Saputra (2005:47) menyarankan alat bantu editor dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan, karena menggunakan model prediksi akan mencapai tingkat keakuratan 82% untuk memutuskan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Setyarno and Januarti (2006) menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan yang diprosikan dengan model prediksi kebangkrutan Altman berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Fanny and Saputra (2005) yang menggunakan model prediksi revisi Z Score Altman sebagai proksi kondisi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang menerima opini audit *going concern* saat perusahaan mengalami kebangkrutan atau kondisi keuangan yang memburuk.

Hipotesis yang dirumuskan :

H₁ : *Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern*

2.3.2 Hubungan Manajemen Laba dan Opini Going Concern

Pencatatan penyusunan laporan keuangan usaha oleh manajer disebabkan karena ketidakakuratan informasi dalam laporan keuangan dan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Sementara para pemakai laporan menilai prospek perusahaan berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, informasi yang menyesatkan dapat merugikan para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. kualitas laba yang baik menunjukkan kelanjutan laba (potensi pendapatan) akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Perekonomian yang diciptakan oleh manajer mempengaruhi kualitas laba perusahaan, sehingga aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak secara akurat menggambarkan pendapatan dari operasi

mereka. Dalam kasus seperti itu, peneliti dapat mengeluarkan opini *going concern*, berdasarkan keadaan atau peristiwa lain. Hipotesis yang dirumuskan :

H₂ : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.3.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Opini Going Concern

Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang memiliki kedudukan dalam perusahaan sebagai kreditur maupun sebagai Dewan Komisaris, atau bisa juga dikatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur perusahaan. Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebab dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, diharapkan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Semakin besar kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen berusaha untuk memaksimalkan kinerja operasionalnya karena merasa memiliki perusahaan dan selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian (Petronila 2007). Hipotesis yang dirumuskan :

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Institusional dan Opini Going Concern

Kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional diyakini memiliki fungsi monitoring yang lebih baik. Investor institusional melakukan monitoring lebih efektif dan tidak akan mudah diperdaya oleh tindakan-tindakan manipulasi yang dilakukan manajemen. Sehingga dengan pengawasan yang lebih optimal dari pemilik institusional diharapkan mendorong kinerja manajemen agar lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan investor.

Bathala *et al.*, (1994) dalam Sabrinna (2010) dalam juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam

mengontrol agency cost. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Short dan Keasy (1999), Morek *et al.*, (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Januarti (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional tersebut diharapkan akan ada monitoring keputusan manajemen, sehingga dapat mengurangi potensi kebangkrutan. Hipotesis yang dirumuskan :

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern

2.3.5 Hubungan Dewan Komisaris Independen dengan Opini Going Concern

Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan serta mengawasi kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku adalah tugas komisaris independen dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan. Komisaris independen diharapkan mampu memberikan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang sering terabaikan sebagai pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya (Linoputri 2010).

Memiliki jumlah komisi independen minimal 30% atau lebih akan menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih baik sehingga menghasilkan opini yang wajar tanpa pengecualian (Linoputri,2010). Petronila (2007) menemukan bahwa komisaris independen mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan sehubungan dengan perlindungan minoritas dan pemegang saham, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern*. Hipotesis yang dirumuskan :

H₅ : Komisaris Independen yang lebih besar berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern

2.4 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel independen berupa kondisi keuangan perusahaan, manajemen laba, mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, manajerial, dan proporsi dewan komisaris) terhadap opini audit *going concern*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Peneliti

